

EVALUASI DAMPAK PEMBANGUNAN SOSIAL BAGI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KABUPATEN PURBALINGGA

Oleh:

Sri Murni Setyawati¹⁾ dan Irma Suryahani²⁾

¹⁾ Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Soedirman

²⁾ Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Soedirman

SUMMARY

This research evaluation is a part of activities development management is to know how the activities development works. Evaluation could be good or bad is depended on the inputs of the monitoring systems. This research is analysed by indicator descriptions. The conclusion shows that Purbalingga's PDRB in 2003 increase about 1.3%. In other side, the gaps among sectors are low enough. It means each sector works better and relatively will be spread evenly. That's why the policy of budget allocation is better to lead to have interrelatedness (backward and forward) for all sectors.

Keywords: *monitoring systems, Indicator description, budget allocation.*

PENDAHULUAN

Pelaksanaan pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat melalui implementasi berbagai kebijakan, program dan kegiatan, sangat terbuka lebar untuk terus ditingkatkan dengan diberikannya otonomi daerah. Aspek substansi dari pembangunan daerah mensyaratkan keterkaitan perencanaan dengan potensi yang dimiliki daerah, yakni kegiatan pembangunan daerah perlu dikaitkan dengan keunggulan sumberdaya yang dimiliki daerah, baik sumberdaya alam, sumberdaya manusia ataupun teknologi. Pertimbangan terhadap potensi daerah ini juga mengungkap perlunya kebijakan pembangunan daerah yang memperhatikan aspek kesinambungan dalam pembangunan daerah. Apabila ini tidak dilakukan dengan tepat, maka pembangunan daerah akan berhadapan dengan masalah ketidak efektifan program pembangunan daerah bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakatnya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka untuk mengetahui apakah pelaksanaan kegiatan pembangunan pada tahun 2003 telah terkait dengan sasaran dan tujuan yang direncanakan, khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, maka perlu dilakukan kegiatan evaluasi dampak pelaksanaan pembangunan tahun 2003 bagi masyarakat di Kabupaten Purbalingga. Evaluasi dilakukan untuk mendapatkan informasi dan menarik pelajaran dari kegagalan atau keberhasilan pelaksanaan pembangunan, sebagai umpan balik bagi pengambilan keputusan dalam rangka

perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian dan kaji ulang (review).

METODE ANALISIS

1. Tipe Penelitian.
Penelitian ini bertipe Evaluasi Kebijakan *Retrospektif*, yaitu suatu tipe penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan gambaran (deskripsi) tentang kinerja kebijakan publik yang telah dilaksanakan pada suatu waktu tertentu.
2. Ruang Lingkup Penelitian.
Makna dari penjabaran ruang lingkup penelitian ini lebih ditekankan pada pembatasan, baik dilihat dari sisi kajian atau fokus penelitian maupun dari sasaran atau lokus penelitian, yaitu penelitian ini hanya mengevaluasi kinerja pembangunan untuk tahun 2003, terutama dilihat dari evaluasi dan analisis kondisi sosial ekonomi daerah, yang lebih ditekankan pada analisis deskriptif dampak yang terkait dengan aspek kesejahteraan sosial.
3. Jenis Data.
Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui form isian, wawancara mendalam (*indepth interview*) dan *focus group discussion* (FGD); sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumentasi atas berbagai data yang dipublikasikan secara resmi oleh instansi terkait.

4. Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan beberapa metode analisis yang relevan untuk mengevaluasi dampak pelaksanaan pembangunan, yaitu:

a. Deskripsi Indikator.

Analisis ini untuk memberikan deskripsi kinerja semua kegiatan sampel (100 buah kegiatan terpilih) yang dilaksanakan pada tahun 2003. Dalam analisis ini, tidak semua indikator kinerja diberikan deskripsinya, melainkan dibatasi hanya pada deskripsi kondisi tiga indikator pertama, yaitu: masukan, keluaran dan hasil. Penentuan tiga indikator ini didasarkan pada kesepakatan umum bahwa indikator manfaat dan dampak cenderung belum dapat dilihat pengaruhnya secara langsung dalam waktu yang relatif singkat (satu tahun atau kurang) sehingga informasinya akan lebih diarahkan pada "kesimpulan" sebagai bentuk manfaat dan dampak yang diharapkan bila kinerja tiga indikator pertama relatif baik.

b. Komparasi.

Analisis ini digunakan untuk menilai kinerja pelaksanaan pembangunan dengan cara membandingkan antara target/rencana dengan realisasi, atau membandingkan kondisi data antar waktu. Analisis perbandingan atau komparasi data (baik berupa komparasi target-realisasi ataupun komparasi antar waktu) merupakan pilihan alternatif analisis yang paling memungkinkan untuk dilakukan pada kegiatan evaluasi ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis yang digunakan untuk mengevaluasi dampak pembangunan kesejahteraan sosial kabupaten Purbalingga Tahun 2003 adalah dengan membandingkan beberapa informasi atau data statistik berdasarkan perbedaan tahun, yaitu kondisi tahun 2003 dibandingkan dengan kondisi tahun 2002. Dalam analisis ini, tidak digunakan indikator kesejahteraan sosial yang bersifat khusus atau menurut pendapat ahli atau lembaga tertentu, namun lebih ditekankan pada indikator yang bersifat umum dan faktual. Artinya, berbagai indikator tersebut akan lebih dikaitkan dengan fenomena, kondisi dan data kesejahteraan sosial yang terekam secara rutin dan dipublikasi secara resmi. Analisis data indikator kesejahteraan sosial tersebut hanya dilihat dari sudut pandang sosial.

1. Kependudukan

Evaluasi masalah kependudukan dapat dilihat dari dua parameter utama, yaitu perubahan laju pertumbuhan penduduk dan peningkatan kualitas penduduk. Perubahan laju pertumbuhan

penduduk menunjukkan adanya perubahan jumlah penduduk. Sedangkan perubahan tingkat kualitas penduduk berkaitan dengan kemampuan mereka dalam hal keahlian dan ilmu pengetahuan (pendidikan) sebagai bekal untuk mendukung pembangunan.

a. Perubahan Laju Pertumbuhan Penduduk.

Pertumbuhan penduduk dan hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja (*labor force*) secara tradisional dianggap sebagai faktor yang positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi kenyataan yang ada, akibat pertumbuhan penduduk pada pembangunan tidaklah demikian, karena pertumbuhan penduduk yang cepat memperberat tekanan pada lahan, kesempatan kerja/ usaha dan dapat menimbulkan masalah: pengangguran, penyediaan pangan, pendidikan, kesehatan dan fasilitas publik lainnya yang luar biasa seiring dengan pertumbuhan penduduk. Pertambahan penduduk dapat menekan pendapatan per kapita, menurunkan standar kehidupan dan yang pada akhirnya menurunkan tingkat pembentukan modal.

Hasil pembangunan yang telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga pada aspek kependudukan tahun 2003 tergolong berdampak positif. Hal ini dapat dibuktikan dari laju pertumbuhan penduduk yang tergolong kecil, dimana jumlah penduduk pada tahun 2002 berjumlah 873.474 jiwa dan pada tahun 2003 naik menjadi 878.235 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk secara alami cenderung menurun, tingkat pertumbuhan penduduk Kabupaten Purbalingga 1,02% (2002) menjadi 0,54% (2003). Jumlah penduduk yang keluar meninggalkan Kabupaten menurun dari 3.859 jiwa pada tahun 2002 menjadi 3.535 jiwa di tahun 2003. Meskipun kepadatan jumlah penduduk meningkat jumlahnya dari 1.318 jiwa per km² menjadi 1.326 jiwa per km², namun masih tergolong sebagai daerah atau wilayah yang tidak padat. Kenaikan kepadatan penduduk tersebut merupakan konsekuensi dari adanya pertumbuhan penduduk.

Bertambahnya jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga dari tahun ke tahun membawa konsekuensi untuk selalu meningkatkan dan mengembangkan kebutuhan dasar masyarakat (seperti perumahan, pendidikan, dan kesehatan serta perluasan lapangan kerja). Oleh karena itu pembangunan kependudukan pada tahun-tahun yang akan datang sebaiknya diarahkan pada upaya meningkatkan mutu hidup manusia sehingga akan tercipta sumber daya manusia yang berkualitas sebagai modal pembangunan.

b. Peningkatan Kualitas Penduduk.

Upaya peningkatan kualitas penduduk juga diarahkan untuk meningkatkan kemampuan keahlian dan pengetahuan untuk ikut serta berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pembangunan di daerah. Semakin tinggi tingkat keahlian dan pengetahuan, semakin tinggi kesempatan mereka untuk terlibat dalam pembangunan.

Pendidikan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan di bidang pendidikan berarti tidak hanya sekedar mentransfer ilmu pengetahuan dan teknologi saja, akan tetapi diharapkan mampu mencerdaskan kehidupan masyarakat dalam rangka ikut memperbaiki mutu kehidupan. Pembangunan di bidang pendidikan juga harus membangun manusia seutuhnya yakni manusia yang beriman, bertakwa dan berbudi pekerti luhur.

Dampak pembangunan pada aspek pendidikan yang telah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga tergolong positif, hal ini dapat dideteksi dari pertambahan jumlah sekolah, jumlah ruang, jumlah siswa baru, dan jumlah lulusan pada tahun 2002 jika dibandingkan tahun 2003.

Jumlah SLTP/MTS pada tahun 2002 sebanyak 89 buah menjadi 90 buah, dengan jumlah ruang kelas meningkat dari 852 buah (2002) menjadi 864 buah (2003). Jumlah SMU/SMK/MA pada tahun 2002 berjumlah 14 buah dan tahun 2003 meningkat menjadi 16 buah, dengan jumlah ruang meningkat dari 169 buah (2002) menjadi 183 buah (2003). Parameter lain yang dapat digunakan untuk menunjukkan dampak pembangunan pendidikan adalah adanya penurunan jumlah siswa baru SD/MI 16.620 menjadi 15.674 yang disebabkan penurunan tingkat fertilitas penduduk (kebethasilan KB), serta peningkatan jumlah siswa baru SMU/SMK/MA dari 2.396 siswa (2002) menjadi 2.521 siswa (2003) karena keberhasilan program pendidikan untuk jenjang SLTP, dan adanya peningkatan jumlah lulusan SD/MI 12.570 (2002) menjadi 12.679 (2003), SMU/SMK/MA dari 1.816 siswa menjadi 1.855 siswa. Untuk tingkat SLTA (SMU/SMK/MA) jumlah lulusan siswa yang melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (angka melanjutkan) ternyata mengalami peningkatan yaitu dari 33,99 (2002) menjadi 59,27 (2003).

Kegiatan pembangunan bidang pendidikan selama tahun 2003 ternyata juga berdampak positif bagi peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat, yang dapat dilihat dari adanya peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), dan angka melanjutkan

sekolah pada tingkat SLTA. Dilihat dari indeks APM pada tahun 2003, mulai dari tingkat SD/MI hingga SMU/SMK/MA semuanya mengalami peningkatan. APM SD/MI pada tahun 2002 sebesar 95,85% menjadi 96,56% (2003), APM SLTP/MTS sebesar 52,24 (2002) meningkat hingga 53,85 (2003), untuk APM SMU/SMK/MA tercatat 22,26 (2002) meningkat menjadi 31,27 (2003). Untuk APK pada tahun 2002 hingga 2003 mengalami peningkatan sejak tingkat SD hingga SLTA. APK untuk Sekolah Dasar/ sederajat tercatat sebesar 116,97(2002) menjadi 117,76 (2003). SLTP/ sederajat 72,26 (2002) menjadi 79,12 (2003), SLTA/ sederajat 35,25 menjadi 37,48 (2003). Rasio kelas/guru mengalami peningkatan dari 0,78 (2002) menjadi 0,95 (2003) sedangkan untuk SLTP dan SLTA tetap sebesar 0,44.

Kondisi di atas menunjukkan bahwa untuk tahun 2003 sudah banyak (atau relatif tinggi) anak usia 7-12 tahun yang berhasil ditampung di SD/MI, artinya bahwa hampir semuanya menempuh pendidikan pada tingkat SD/MI. Akan tetapi, untuk anak usia yang lebih tinggi, yaitu 13-15 tahun dan anak usia 16-18 tahun masih cukup banyak yang belum tertampung di SLTP/MTS dan SMU/SMK/MA. Pada waktu yang akan datang semakin perlu ditingkatkan berbagai upaya perluasan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan (tertampung di SLTP/MTS dan SMU/SMK/MA) bagi penduduk usia sekolah menengah

2. Ketenagakerjaan

Dalam konteks pembangunan manusia, masalah ketenagakerjaan merupakan aspek yang penting, karena langsung berkaitan dengan pembangunan ekonomi, pendapatan dan daya beli untuk dapat hidup layak dan khususnya dalam upaya mengurangi jumlah penduduk miskin. Perkembangan ketenagakerjaan secara selintas dapat dilihat dari besarnya keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi yang diukur dengan porsi penduduk yang masuk dalam pasar kerja, yaitu penduduk usia 10 tahun ke atas yang bekerja dan yang mencari pekerjaan. Pengertian bekerja tidak mencakup mereka yang berstatus sebagai buruh tetapi termasuk yang melakukan usaha sendiri.

Meskipun berbagai upaya pembangunan di berbagai sektor telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan sebagai akibat krisis moneter tahun 1997, namun hingga tahun 2003 masalah ketenagakerjaan belum dapat teratasi secara tuntas, karena adanya faktor pertumbuhan penduduk secara alami; sebagaimana diketahui bahwa jumlah penduduk usia 15 ke atas pada tahun 2002 berjumlah 594.876 jiwa, pada tahun 2003 meningkat menjadi 646.043 jiwa.

Dilihat dari sisi jumlah angkatan kerja juga menunjukkan adanya peningkatan, dimana yang

semula berjumlah 374.739 jiwa (2002) meningkat menjadi 356.175 jiwa (2003), dengan jumlah penganggur terbuka meningkat dari 18.564 orang (2002) menjadi 18.973 orang (2003), demikian pula untuk pencari kerja meningkat dari 17.219 orang (2002) menjadi 18.545 orang (2003). Kondisi ini sebagai indikasi bahwa pembangunan pada tahun 2003 belum mampu mengatasi masalah ketenagakerjaan, atau dengan kata lain pembangunan di sektor riil belum mampu mengimbangi laju pertumbuhan penduduk khususnya pada usia kerja (usia tahun 15+)

Melihat kondisi di atas maka ke depan, pembangunan ketenagakerjaan harus terus diupayakan, khususnya untuk peningkatan perluasan dan pemerataan kesempatan kerja/usaha, peningkatan keahlian dan ketrampilan dengan memperluas fasilitas pelatihan dalam rangka meningkatkan mutu angkatan kerja.

Masalah yang perlu mendapatkan perhatian khusus adalah penanganan penduduk usia muda (usia kerja dan tidak sekolah) yang masih menganggur, terutama di daerah perkotaan. Apabila kondisi ini tidak secepatnya mendapatkan perhatian yang serius, dikemudian hari akan terjadi kerawanan sosial dan kriminal. Balai atau Kursus Latihan Kerja yang ada di kota harus berperan aktif terutama dalam memberikan ketrampilan kepada penduduk pada usia kerja tersebut dengan lebih menekankan pada kesempatan membuka usaha mandiri atau wirausaha.

Dilihat dari kemampuan penyerapan tenaga kerja menurut sektor nampaknya di beberapa sektor masih lemah. Berdasarkan data yang ada pada tahun 2003 tampak bahwa kemampuan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian sebesar 14 orang, sektor industri sebesar 12.150 orang, sektor listrik sebesar 130, sektor bangunan sebesar 374 orang, sektor perdagangan sebesar 503 orang, sektor angkutan sebesar 168 orang, sektor keuangan sebesar 203 orang, sektor jasa/pariwisata sebesar 270 orang. Tingginya penyerapan tenaga kerja di sektor industri dan rendahnya penyerapan di sektor pertanian perlu memperoleh perhatian yang lebih serius mengingat Kabupaten Purbalingga termasuk sebagai wilayah agraris (pertanian).

Di masa mendatang pihak Pemerintahan Kabupaten Purbalingga harus lebih memperhatikan keterkaitan antara potensi kewilayahan, dunia pendidikan, minat masyarakat dalam menyusun kebijakan pembangunan sektoral.

3. Peningkatan Standar Kehidupan

a. Kesehatan Masyarakat

Salah satu indikator penting dalam menilai peningkatan standar status kesejahteraan sosial masyarakat adalah melalui tingkat kesehatan masyarakat. Tingkat kesehatan ini tentu saja

sangat kompleks, demikian pula dengan indikator pengukurannya; pada kasus penelitian ini akan digunakan beberapa indikator seperti status gizi masyarakat yang ditunjukkan dengan nilai KEP, tingkat kematian bayi, tingkat kunjungan pasien ke Puskesmas.

Secara kuantitatif maupun kualitatif hasil pembangunan pada tahun 2003, berdampak positif pada bidang kesehatan, hal ini antara lain dapat ditunjukkan dengan: penurunan jumlah bayi yang mengalami kekurangan energi protein (KEP), dimana pada tahun 2002 berjumlah 1.395 menurun menjadi 782 (2003), penurunan tingkat kematian bayi dari 178 kejadian (2002) menjadi 91 kejadian (2003), dan penurunan jumlah kunjungan masyarakat (pasien) ke Puskesmas menurun dari 675.639 pasien pada tahun 2002 menjadi 462.271 pasien (2003); kondisi ini berarti jumlah penderita sakit menurun atau tingkat kesehatan semakin baik.

Kualitas kesehatan penduduk yang semakin baik juga dapat dilihat dari sisi kesehatan lingkungan, yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan jumlah penduduk yang berjam-ban dari 389.400 jiwa pada tahun 2002 meningkat menjadi 444.308 jiwa pada tahun 2003, dan peningkatan jumlah penduduk pengguna air bersih dari 545.187 jiwa pada tahun 2002 menjadi 584.812 jiwa pada tahun 2003. Kondisi di atas menunjukkan bahwa lingkungan sekitar penduduk yang semakin baik dan bersih (higienis) akan sangat berdampak pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Salah satu pendukung utama terciptanya peningkatan kesehatan masyarakat adalah ketersediaan sarana dan prasarana (sumberdaya) kesehatan yang memadai; terkait dengan hal tersebut, ada beberapa yang mengalami penurunan dan yang lainnya mengalami peningkatan. Beberapa sumberdaya kesehatan yang mengalami peningkatan pada tahun 2003 dibandingkan tahun sebelumnya (2002), seperti: jumlah balai pengobatan meningkat dari 12 buah (2002) menjadi 14 buah (2003), jumlah dokter spesialis meningkat dari 9 dokter (2002) menjadi 12 dokter (2003), jumlah bidan meningkat dari 170 orang (2002) menjadi 172 orang (2003), jumlah paramedis yang semula 376 orang (2002) meningkat menjadi 380 orang (2003). Sedangkan beberapa sumberdaya kesehatan yang menurun, seperti: jumlah Puskesmas dan Pustu yang semula berjumlah 72 buah (2002) berkurang satu menjadi 71 buah (2003), jumlah dokter praktek berkurang dari 55 orang (2002) menjadi 42 dokter (2003).

Dilihat dari jumlah jumlah akseptor KB Aktif menunjukkan adanya peningkatan, dimana pada tahun 2002 sebanyak 121.605 akseptor meningkat menjadi 124.440 akseptor pada

tahun 2003. Kondisi ini tentunya akan mendukung bagi terciptanya kondisi keluarga yang sehat dan sejahtera.

b. Pengentasan Kemiskinan

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan sosial masyarakat adalah tingkat kemiskinan penduduk, yang dapat dilihat dari jumlah penduduk miskin. Informasi tentang jumlah penduduk miskin ini diambil dari hasil pendataan tentang keluarga pra-sejahtera alasan ekonomi di Kabupaten Purbalingga.

Dilihat dari sisi dampak, maka aktivitas pembangunan yang dilaksanakan pada tahun 2003 tampaknya belum berhasil untuk mengurangi secara signifikan jumlah penduduk miskin ini. Data yang ada menunjukkan bahwa pada tahun 2002 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Purbalingga sebanyak 42.944 KK, kemudian meningkat jumlahnya menjadi menjadi 50.271 KK pada tahun 2003. Beberapa faktor yang diduga berperan terhadap peningkatan jumlah penduduk miskin diantaranya: (1) kuatnya tekanan krisis ekonomi tahun 1997 sehingga sebagian penduduk gagal untuk memulihkan kondisi ekonomi keluarga, adanya PHK, keterbatasan kemampuan Pemda Kabupaten Purbalingga dalam menciptakan lapangan kerja/usaha yang baru, belum pulihnya aktivitas sektor riil di daerah Purbalingga dan sekitarnya, juga dimungkinkan karena keterbatasan keterampilan/ pendidikan penduduk miskin setempat, sehingga tidak bisa masuk pasar kerja di daerah/kabupaten sekitar Purbalingga.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka hasil evaluasi dampak social pelaksanaan pembangunan kabupaten Purbalingga terhadap peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi dampak pelaksanaan pembangunan terhadap peningkatan kesejahteraan sosial hanya dilihat dari sudut pandang social.
2. Kondisi dampak pembangunan kesejahteraan dilihat dari sisi sosial diarahkan pada tiga aspek pokok, yaitu; kependudukan, pendidikan, dan kesehatan. Kondisi yang ditemukan pada tahun 2003, antara lain terjadi:
 - a. Pada komponen kependudukan, terjadi penurunan laju pertumbuhan penduduk secara alami sebesar 0,48%, yaitu dari 1,02% menjadi 0,54%; laju pertumbuhan penduduk yang rendah ini, dimasa mendatang akan menguntungkan daerah dalam penyelenggaraan pemenuhan

kebutuhan dasar penyelenggaraan pendidikan, lapangan kerja, kesehatan, perumahan. dan peningkatan kualitas penduduk,

- b. Pada aspek ketenagakerjaan, terjadi tingkat penyerapan tenaga kerja yang relatif kecil. Sektor yang terbanyak menyerap tenaga kerja adalah sektor industri, sedangkan sektor basis pertanian relatif sedikit menyerap tenaga kerja; kondisi ini perlu memperoleh perhatian yang lebih serius mengingat Kabupaten Purbalingga termasuk sebagai wilayah agraris (pertanian). Selain itu diketahui pula bahwa jumlah angkatan kerja di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2003 meningkat (5,0%), jumlah penganggur terbuka meningkat (2,1%) pencari kerja meningkat (7,7%).
- c. Pada komponen pendidikan, pihak Pemerintah Kabupaten Purbalingga pada tahun 2003 berhasil meningkatkan peningkatan APM dan APK pada semua jenjang pendidikan secara cukup signifikan, yang diimbangi dengan adanya penambahan beberapa prasarana gedung sekolah baru atau rehab, sehingga menambah besar rasio kelas dengan murid sebagai bentuk peningkatan pelayanan dibidang pendidikan.
- d. Hasil pembangunan komponen kesehatan masyarakat pada tahun 2003 secara, berdampak positif karena menurunkan angka KEP balita 44,4%, penurunan angka kematian bayi 48,9%, penurunan pasien atau penderita sakit 31,6%, penambahan jamban masyarakat 14%, penambahan balai pengobatan 17%, penambahan dokter spesialis 33,3%, bidan 1,2%, para medis 1,3%, dan peserta KB aktif 23%.

Implikasi dari penelitian ini adalah pembangunan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat harus lebih ditingkatkan, terutama diarahkan pada aspek kependudukan, pendidikan, kesehatan, dan perekonomian yang masih belum optimal, seperti: penanganan masalah pengangguran dan pencari kerja, pengurangan secara signifikan kesenjangan pembangunan sektoral dan wilayah, dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. *Purbalingga Dalam Angka, 2003*.
Kabupaten Purbalingga

_____. *Rencana Strategis Daerah, 2003*.
Kabupaten Purbalingga

_____. *Rencana Strategis Bappeda, 2003*.
Kabupaten Purbalingga

Hera Susanti, Moh. Ikhsan, Widyanti. 1995.
Indikator Makro Ekonomi. LP-FE UI. Jakarta

Lincoln Arsyad. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. BPFE UGM. Yogyakarta